

TESIS

**URGENSI PENGATURAN *CITIZEN LAWSUIT*
MELALUI PENAFSIRAN TERHADAP PASAL 53 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9
TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**



ROY SYAHPUTRA

No. Mhs.: 195202998/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2023**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : ROY SYAHPUTRA

Nomor Mahasiswa : 195202998/PS/MIH

Konsentrasi : Hukum Litigasi

Judul Tesis : **URGENSI PENGATURAN *CITIZEN LAWSUIT***

**MELALUI PENAFSIRAN TERHADAP PASAL 53
AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA**

NAMA PEMBIMBING

TANGGAL

TANDA TANGAN

1. Dr. V. Hari Supriyanto,

S.H., M.Hum.

9/01/2023

2. Dr. Hyronimus Rhiti,

S.H., LL.M.

9/01/2023



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ROY SYAHPUTRA

Nomor Mahasiswa : 195202998/PS/MIH

Konsentrasi : Hukum Litigasi

Judul Tests URGENSI PENGATURAN CITIZEN LAWSUIT
MELALUI PENAFSIRAN TERHADAP PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
(Ketua) Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum	31/01/2023	
(Sekretaris) Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.	27/01/2023	
(Anggota) Dr. D. Krisnantoro, S.H., M.Hum.	30/01/2023	

Ketua Program Studi

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Hukunari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ROY SYAHPUTRA
Nomor Mahasiswa : 195202998/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Litigasi

Dengan ini menyatakan bahwa: Tesis ini dengan judul “Urgensi Pengaturan *Citizen Lawsuit* Melalui Penafsiran Terhadap Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ” merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Atma Jaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Tesis ini merupakan gagasan, rumusan dan penelitian dari penulis sendiri. Semua informasi yang ada dalam tesis ini yang akan dikutip dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebutkan secara lengkap identitas pengarang, dan bukunya sesuai dengan standar penulisan yang baik dan benar. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan atau sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Januari 2023
Yang Menyatakan;



ROY SYAHPUTRA

ABSTRAK

Hukum pada prinsipnya merupakan suatu instrumen yang dilahirkan untuk melindungi setiap warga negara maupun badan hukum perdata dari tindakan kesewenang-wenang oleh suatu kekuasaan. Namun hukum tidak dapat dijalankan apabila tidak didukung oleh suatu sistem yang terbentuk dengan baik. Akan tetapi, negara bisa lalai untuk melindungi hak asasi manusia dengan suatu kebijakan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dapat merugikan warga negara secara umum, berdasarkan kelalaian tersebut diperlukan jenis gugatan yang dapat menghukum atas kelalaian negara tersebut, hal ini ada pada jenis gugatan *Citizen Lawsuit*. Di Indonesia sudah ada beberapa kasus atau perkara, akan tetapi melalui gugatan di peradilan umum, yakni di bawah kendali pemegang kekuasaan kehakiman yang lain Mahkamah Agung. Salah satu kelemahan *citizen lawsuit* di Indonesia yaitu tidak adanya regulasi yang mengatur. Oleh sebab itu, jika berbicara tentang *citizen lawsuit* maka sudah tentu hal tersebut berbicara tentang tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Diberlakukannya *citizen lawsuit* di Indonesia saat ini, tentu masih harus dibenahi serta diperjelas dan diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kewenangan pengadilan mana saja yang memiliki kompetensi untuk menerima gugatan warga negara (*citizen lawsuit*). maka dari itu rumusan masalah dalam tesis ini mempertanyakan: Bagaimana urgensi pengaturan *Citizen Lawsuit* pada sistem hukum Indonesia dalam kaitan penyelesaian sengketa tata usaha negara?. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Objek penelitian ini adalah pengupayaan pengaturan *Citizen Lawsuit* di dalam hukum Indonesia. Hasil penelitian adalah, ditafsirkan bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara dianggap kompeten dan sangat berpeluang untuk menerima gugatan *citizen lawsuit*.

Kata Kunci: Urgensi, *Citizen Lawsuit*, Peradilan Tata Usaha Negara.

ABSTRACT

In principle, law is an instrument created to protect every citizen and civil legal entity from arbitrary actions by a power. However, the law cannot be implemented if it is not supported by a well-formed system. However, the state can be negligent in protecting human rights with a policy on State Administrative Decisions issued which can be detrimental to citizens in general, based on this negligence a type of lawsuit is needed that can punish the state's negligence, this is in the Citizen Lawsuit type of lawsuit. In Indonesia, there have been a number of cases or cases, but these have been filed in general courts, namely under the control of other judicial authorities, the Supreme Court. One of the weaknesses of citizen lawsuits in Indonesia is the absence of regulations. Therefore, when talking about citizen lawsuits, of course it talks about the responsibility of state administrators for their negligence in fulfilling citizens' rights. The current implementation of citizen lawsuits in Indonesia, of course, still needs to be addressed and clarified and strengthened, both from a regulatory perspective and from the authority side of which courts have the competence to accept citizen lawsuits. Therefore the formulation of the problem in this thesis asks: What is the urgency of regulating Citizen Lawsuit in the Indonesian legal system in terms of resolving state administrative disputes? The research conducted is a type of normative legal research with statutory and comparative approaches. The object of this research is the effort to regulate Citizen Lawsuit in Indonesian law. The results of the study are interpreted that Article 53 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2004 concerning Amendments to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, the State Administrative Courts are considered competent and very likely to accept citizen lawsuits lawsuit.

Keywords: Urgency, Citizen Lawsuit, State Administrative Court.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat kasihnya kepada penulis, sehingga penyusunan tesis yang berjudul “Urgensi Pengaturan *Citizen Lawsuit* Melalui Penafsiran Terhadap Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” dapat diselesaikan. Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan mendorong penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.,Hum selaku dekan fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus selaku Pembimbing Tesis, penulis banyak berterimakasih karena banyak membantu arahan dan masukan sehingga sehingga selesainya penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing/ Penguji yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan petunjuk bagi penyusunan tesis ini, sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Bapak Prasetyo Wibowo, S.H. M.H Selaku Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah bersedia untuk memberikan data serta keterangan selama penulis melakukan penelitian.
6. Ibu Cahyeti Riyani, S.H. Selaku Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah bersedia untuk memberikan data serta keterangan selama penulis melakukan penelitian.
7. Kedua Orang Tua yang telah memberikan suport dalam masa perkuliahan bagi penulis.
8. Teman-teman Magister Ilmu Hukum, Angkatan 2018 dan 2019 Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan dunia pendidikan terkhususnya pada bidang ilmu hukum litigasi.

Penulis

ROY SYAHPUTRA

DAFTAR ISI

JUDUL	
PERSETUJUAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. <i>Citizen Lawsuit</i>	16
1. Pengertian <i>Citizen Lawsuit</i>	16
2. Pengaturan Hukum Tentang <i>Citizen Lawsuit</i>	20
3. Sejarah <i>Citizen Lawsuit</i>	23
4. Unsur-Unsur Pengaturan <i>Citizen Lawsuit</i>	23

B. Peradilan Tata Usaha Negara	25
1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara.....	25
2. Sejarah Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara	29
C. Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara	34
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	34
2. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.....	36
3. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara	40
D. Landasan Teori	45
1. Teori Negara Hukum	45
2. Teori Penafsiran Hukum	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan	56
C. Data.....	57
D. Metode Pengumpulan Data	58
E. Analisa Data.....	59
F. Penarikan Kesimpulan	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Urgensi Pengaturan Hukum <i>citizen lawsuit</i> di Indonesia	61
B. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.....	71
C. Garis besar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	78

D. Penafsiran Terhadap Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	82
1. Penafsiran Hukum.....	82
2. Penafsiran Teleologis Terhadap Pasal 53 Ayat (1).....	91
3. Penafsiran Sistematis Terhadap Pasal 53 Ayat (1)	94
E. Perbandingan Citizen Lawsuit Indonesia Dengan Citizen Lawsuit Amerika	97
F. Politik Hukum Pengaturan Citizen Lawsuit di Indonesia.....	106
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	